

Transformasi ekonomi: Dengan hadirnya pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Indonesia

Vebya Yuwa Ayu Mashanda

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: vebyaayuwa@gmail.com

Kata Kunci:
transformasi;
pembangunan;
berkelanjutan; sosial;
ekonomi

Keywords:
transformation;
development; sustainable;
social; economic

ABSTRACT

Sebagai suatu negara Indonesia sering mengadakan pembangunan dengan tujuan sebagai proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang bermanfaat adalah pembangunan yang senantiasa memperhatikan konsep kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan hidup, serta pelestarian dan peningkatan nilai-nilai alam. Munculnya permasalahan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan membawa konsekuensi dan Bukti bahwa pembangunan yang komprehensif diperlukan, dengan komponen-komponen yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup, dan bahwa komponen-komponen tersebut harus berkembang secara beriringan. Maka dari itu muncul transformasi pembangunan ke pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tujuan adanya perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya dan tercipta aktivitas ekonomi yang lebih efisien. Adapun faktor pendorong dan upaya agar bisa terwujudnya program pembangunan berkelanjutan. Ada empat (4) alasan utama yang dikemukakan dalam The Global Tomorrow Coalition mengenai perlunya pembangunan yang berkepanjangan. Keempat hal tersebut di atas saling berhubungan karena kesamaan landasannya mencakup seluruh bidang perekonomian. Dan ada lima upaya yang harus dilakukan agar dapat melaksanakan pembangunan ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja yang produktif antara berbagai lembaga pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal, begitu pula kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tanpa mengorbankan norma atau nilai ekonomi, lingkungan, atau sosial.

ABSTRACT

As a country, Indonesia often conducts development with the aim of being a process of change towards something better. It can be said that development that provides benefits is development that always pays attention to the concepts of social welfare, environmental sustainability, as well as epidemics and robs of natural beauty. The emergence of problems due to unsustainable development brings consequences and demands that sustainable development is needed with sustainable development pillars in the form of economic sustainability, social sustainability and environmental sustainability, all three of which must develop in a balanced manner. Therefore, there appears the transformation of development to sustainable development. The purpose of this change is to improve the welfare of its people and create more efficient economic activities. The driving factors and efforts to realize a sustainable development program. The Global Tomorrow Coalition states that there are four (4) things that are the basic reasons for sustainable development. These four things are interrelated with each other because each base covers every area of the economy. And there are five main businesses that need to be done to carry out environmentally sound development. Without disregarding the rules of the economy, nature-ecology, and civilization, this endeavor also necessitates the existence of social capital that can keep the lines of communication open between different branches of government on both the horizontal and vertical levels.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Tiada negara di era modern yang tidak terlibat dalam pembangunan nasional. Tujuan pembangunan adalah untuk memfasilitasi transisi menuju sesuatu yang lebih baik. Tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki kondisi dibandingkan keadaan yang sudah ada sebelumnya. Upaya konstruksi juga perlu memperhatikan hal-hal mendasar yang melandasi setiap tahapan pembangunan. Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan lingkungan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang bermanfaat adalah pembangunan yang senantiasa memperhatikan konsep kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan hidup, serta pelestarian dan peningkatan nilai-nilai alam.

Penyelenggaraan pembangunan secara tidak langsung dipengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Secara umum tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga mampu hidup bermartabat dan lebih baik. Selain itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan, maka perlu dilakukan kelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi degradasi dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga kondisi lingkungan guna mencegah kepunahan spesies. Dalam konteks ini, apabila terjadi kerusakan dan penurunan yang signifikan pada ekosistem di mana manusia bermukim, maka kehidupan manusia akan menghadapi tantangan yang beragam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kegagalan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperiksa ulang dalam pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mewariskan alam yang kaya akan sumber daya kepada generasi berikutnya. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan dinamis alam dalam penggalian sumber daya alam, dengan memastikan kelestariannya. Terakhir, perencanaan kehidupan manusia harus tetap mempertimbangkan penciptaan lingkungan yang lestari, yang pada gilirannya akan memberikan kepuasan dalam berbagai aspek seperti fisik, ekonomi, sosial, dan spiritual. Selain itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan pengembangan sumber daya alam, tetap harus disertai dengan: strategi atau rencana penyiapkan kesadaran akan suatu masalah lingkungan, kebijakan yang fokus pada perbaikan lingkungan hidup bangsa Indonesia, baik untuk beberapa waktu di masa depan dan selamanya, memanfaatkan sumber daya hayati namun tetap dengan tujuan melestarikan lingkungan, merencanakan pembangunan dengan tujuan mencapai keseimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, spiritual, mengupayakan dan memperjuangkan sebagian hasil pembangunan yang dapat membantu memperbaiki lingkungan yang disebabkan oleh proyek-proyek pembangunan, dan akhirnya, ketika dipaksa atau berguna, kita tidak memaksakan diri pada sumber daya, kita tidak memaksa diri kita untuk menjadi lebih baik, itu harus tetap moderat dan mencari kemungkinan.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana program pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mencapai

tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi negara dapat terus dilaksanakan tanpa ada atau terjadi kerusakan lingkungan yang berakibat jangka Panjang.

Pembahasan

Kondisi di Indonesia Sebelum dan Setelah Diterapkannya Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum Diterapkannya Pembangunan Berkelanjutan

Kasus pertama yang menimbulkan polemik saat terjadi kegiatan pembangunan adalah penggusuran secara paksa. Penggusuran di sini diartikan sebagai pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnya lahan. Sedangkan di wilayah rural penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar seperti misalnya bendungan (Nulhaqim et al., 2020). Penghancuran perkampungan miskin di perkotaan mengganggu stabilitas jaringan sosial, mengganggu rutinitas sehari-hari seperti bekerja dan sekolah, dan menghabiskan sumber daya budaya. Hal ini melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan dari perspektif sosial berkelanjutan, karena penggusuran merupakan pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal permanen dan hak atas kepemilikan pribadi.



Gambar 1. Proses Penggusuran Paksa



Gambar 2. Masyarakat yang Berdemo Karena Terjadi Ketidakadilan

Kasus kedua yang menimbulkan polemik saat terjadi kegiatan pembangunan adalah pembukaan hutan untuk dijadikan pemukiman, persawahan, dan pertanian. Adapun dalam prosesnya sering kali mengabaikan aspek-aspek pelestarian lingkungan

seperti pembakaran hutan, penebangan pohon tanpa adanya penanaman ulang, dan lain sebagainya. Dilansir dari (Walhi, 2020) di Indonesia tepatnya di hutan Sumatera, Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksplorasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Hal ini merupakan bagian dari pelanggaran pembangunan berkelanjutan dalam perspektif global, karena dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan tidak hanya dirasakan pada hilangnya pohon-pohon yang menyerap karbon dioksida, namun juga pada percepatan deforestasi dan menipisnya persediaan air bersih.



Gambar 3. Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah.



Gambar 4. Pembukaan Hutan untuk Lahan Kelapa Sawit

Setelah Diterapkannya Pembangunan Berkelanjutan

Pada kasus pertama yakni penggusuran paksa, telah ada transformasi untuk menuju keberlanjutan sosial yakni dengan upaya preventif sebagai solusinya. Strategi pencegahan adalah setiap tindakan rekayasa sosial yang dilakukan dengan harapan mencegah atau mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan pencegahan biasanya diambil terhadap mereka yang tidak menyadari atau tidak peduli terhadap suatu masalah. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan (Nulhaqim et al., 2020).

Upaya tersebut berupa pemberdayaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pembangunan masyarakat yang sukses mengubah asumsi mendasar masyarakat mengenai nilai alam sekitar mereka. Selain pemberdayaan, solusi yang diberikan agar mencegah dan tidak terjadi konflik antara lain:

1. Sosialisasi. Sosialisasi ini merinci manfaat apa yang dapat diharapkan dari rencana

pembangunan dan tindakan apa yang ingin diambil pemerintah untuk mengurangi dampak terhadap penduduk yang terkena dampak. Bagi masyarakat yang kurang bisa menerima pembangunan seperti ini, penting untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan tujuan menyebarkan informasi.

2. Mufakat. Mufakat adalah kesepakatan antara warga yang terkena dampak dan otoritas pemerintah tentang bagaimana lahan harus dikelola. Konflik diharapkan dapat dihindari ketika para mufakat berkumpul untuk musyawarah. Masyarakat tidak merasa direpotkan dengan pembangunannya, dan pemerintah tidak memberikan hambatan apa pun terhadap proses pembangunan tersebut.
3. Ganti rugi. Perselisihan sering kali muncul ketika pemilik tanah yang dibebaskan menuntut kompensasi uang karena menyerahkan properti mereka. Hal ini dapat diatasi dengan menyediakan karpet pengganti sesuai harga pasar untuk properti yang diambil alih, sehingga penghuni dapat dengan senang hati menyerahkan rumah mereka dengan imbalan kompensasi yang adil.
4. Partisipasi komunitas. Setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan aktif dalam berbagai proyek pembangunan. Hak untuk memilih ini dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C Ayat 3 UUD Tahun 1945. Masyarakat akan merasa memiliki terhadap program pembangunan dan lebih antusias dalam melaksanakannya jika diikutsertakan dalam program tersebut. Prosesnya sejak awal.
5. Relokasi. Warga yang terkena dampak direlokasi ke lokasi yang lebih sesuai. Permasalahannya adalah lokasi baru jarang mempunyai tingkat layanan publik yang sama dengan lokasi dimana penduduknya mengungsi. Pemerintah sebaiknya mengedepankan kepraktisan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik



Gambar 5. Hunian Relokasi Bagi Warga Miskin Terdampak Pembangunan New Yogyakarta International Air Port Di Lahan Pakualam



Gambar 6. Kopri dan Kohati Saat Memberikan Edukasi Pada Warga Korban Penggusuran di Pantai Merpati Bulukumba

Masuk pada kasus kedua yang menimbulkan polemik saat terjadi kegiatan pembangunan adalah pembukaan hutan untuk dijadikan pemukiman, persawahan, dan pertanian. Adapun kondisi yang sudah mencerminkan keberlanjutan lingkungan ini terlihat dengan melakukan penanaman ulang setelah menebang (*replanting*). Dengan adanya *replanting* maka tingkat kerapatan tanaman akan tetap terjaga dan membantu upaya menekan kematian bibit (Nordlander et al., 2017). Selain itu, terdapat pembangunan MRT dengan tujuan mampu mengurangi adanya emisi karbon sehingga ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas umum untuk mencegah terjadi perubahan iklim (Gunawan, 2022).



Gambar 7. Proses Pembangunan MRT di Jakarta



Gambar 8. Bentuk MRT di Jakarta

Faktor Pendorong Pembangunan Berkelanjutan

Hakikatnya, pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat suatu sistem, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) rakyat yang lebih baik (Rosana, 2018). Ditegaskan ulang dalam penelitian yang dilakukan oleh (Suparmoko, 2020) bahwa jangan sampai sumber daya alam habis dan lingkungan rusak tanpa peningkatan baik jumlah dan kualitas sumber daya manusia maupun modal buatan manusia. Maka dari itu pemeliharaan lingkungan hidup diupayakan dalam rangka menghindari terjadinya kepunahan kehidupan.

Sejalan dengan itu, dalam *The Global Tomorrow Coalition* menyebutkan bahwa ada empat (4) hal yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan. Keempat hal tersebut adalah:

1. Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal pokok yang

saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan mengawali integrasi yang terjadi antara lingkungan dan ekonomi .

2. Persoalan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain.
3. Masalah ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik.
4. Pentingnya kerja sama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak memedulikan batas-batas negara.

Selain itu, kecenderungan menipisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan menjadi faktor diperlukannya pembangunan berkelanjutan yang harus bisa diubah atau bahkan dibalikkan ke arah penemuan cadangan sumber daya alam yang baru dan yang terbarukan disertai dengan perbaikan kualitas lingkungan (*reversing the degradation trend of the natural environment*). Paradigma perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan itulah yang menjadi paradigma pembangunan baru sekarang ini. Karena sudah dikemukakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis di tiga bidang utama, yaitu krisis air, krisis pangan, dan krisis energi jika pembangunan ekonominya tidak berpegang pada pembangunan berkelanjutan (Pasang, 2011).

Upaya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rosana, 2018) ditegaskan bahwa ada terdapat lima pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, dalam (Suparmoko, 2020) disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan ditekankan sebagai fokus utama pemerintah pada reformasi hukum lingkungan hidup. Reformasi undang-undang lingkungan hidup merupakan langkah terakhir dalam siklus perencanaan lingkungan hidup, setelah legislasi awal, penetapan standar, penerbitan izin, dan

penerapan peraturan. Ketika kita berbicara tentang pelanggaran hukum lingkungan hidup, yang sebenarnya kita maksudkan adalah bahwa pembangun yang secara terang-terangan mengabaikan peraturan bangunan akan diberikan ganti rugi hukum. Baik yang mengikat adalah undang-undang administratif, data, dan fiskal yang dikodifikasi dalam Kode Keuangan.

Selain itu, harus ada inspeksi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas terkait. Sebelum konstruksi dimulai, checks and balances ditetapkan. Dalam hal ini, peran AMDAL sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup melalui inspeksi (pemeriksaan izin) dan pemantauan. AMDAL dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari proses konstruksi.

Kesimpulan

Dewasa ini, pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan dan sudah menjadi tuntutan setiap negara. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai berkelanjutan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek lain seperti, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya saling berhubungan dan bersinggungan satu sama lain. Dari makna tentang pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya program pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan dan masyarakat berdampak dan terpengaruh oleh proses pembangunan. Karakteristik suatu sistem tidak sesuai dengan karakteristik sistem lainnya. Oleh karena itu, kerukunan masyarakat dan perlindungan lingkungan sangat ditekankan agar kekerasan dan perselisihan dalam kehidupan sehari-hari dapat dihindari. Adapun *The Global Tomorrow Coalition* menyebutkan bahwa ada empat (4) hal yang menjadi alasan dasar dari pembangunan berkelanjutan. Keempat hal tersebut saling terkait satu sama lain karena tiap-tiap dasar mencakup setiap bidang dalam perekonomian. Selain itu, menipisnya sumber daya alam dan degradasi lingkungan merupakan faktor penghambat yang harus diatasi dengan mengarahkan upaya pembangunan ke arah penemuan sumber daya alam yang baru dan mutakhir serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan program pembangunan diperlukan upaya-upaya di dalamnya. Ada lima upaya utama yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan ramah lingkungan. Modal sosial yang mampu menjaga hubungan produktif antara berbagai tingkatan pemerintahan juga diperlukan, begitu pula kerja sama antara negara dan sektor swasta serta masyarakat sipil yang tidak melanggar norma-norma lingkungan atau sosial. Fokus pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan hidup sangatlah penting. Ketika kita berbicara tentang pelanggaran hukum lingkungan hidup, yang sebenarnya kita maksudkan adalah bahwa pembangun yang secara terang-terangan mengabaikan peraturan bangunan akan diberikan ganti rugi hukum.

Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang agar program pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara maksimal dalam transformasi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yaitu:

1. Dari sisi masyarakat adalah perlunya penanaman kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan itu penting dan akan memengaruhi efek jangka panjang. Jika kesadaran masyarakat kurang, maka akan mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti pada kasus kebakaran hutan guna pembukaan lahan.
2. Pemerintah bekerja sama dengan media masa dengan memberikan informasi secara berkala tentang pentingnya pertumbuhan berkelanjutan serta dampak positif yang ditumbuhkan di masa yang akan datang. Karena informasi yang bisa tersampaikan dengan baik akan dapat mudah dipahami oleh organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri.
3. Pemerintah juga harus mampu untuk memberikan upaya-upaya yang berkelanjutan seperti upaya preventif. Sehingga tidak terjadi konflik dan keberlanjutan sosial dapat terlaksana dengan baik. Dengan ini masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah karena pemerintah mampu untuk memberikan solusi bijaksana yang menyejahterakan masyarakat yang terdampak.

Daftar Pustaka

- Bai, C., Sarkis, J., & Dou, Y. (2015). Corporate sustainability development in China: Review and analysis. *Industrial Management and Data Systems*, 115(1), 5–40. <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2014-0258>
- Gunawan, I. (2022). Kajian model bisnis untuk pengelolaan kawasan Stasiun MRT Jakarta beserta aturan hukum pemanfaatan ruang yang diperlukan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2233–2249.
- Jr., R. E. L. (1988). On The Mechanics Of Economic Development. *Journal of Monetary Economics* 22, 22 (February), 3–42. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Levine, R. (1999). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. *Finance and Private Sector Development Division Policy Research Department World Bank*, October 1996. <https://ssrn.com/abstract=604955>
- Mingaleva, Z., Zhulanov, E., Shaidurova, N., & Vukovic, N. (2019). Economic Transformation of a Mining Territory Based on the Application of a Cluster Approach. 24(3), 257–268.
- Nordlander, G., Hellqvist, C., & Hjelm, K. (2017). Replanting conifer seedlings after pine weevil emigration in spring decreases feeding damage and seedling mortality. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 32(1), 60–67. <https://doi.org/10.1080/02827581.2016.1186220>
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Social Work Jurnal*, 10(1), 109–117. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Pasang, H. (2011). Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS*, 40(4).

- Richard, B., Carlaw, K. I., & Bekar, C. T. (2006). Economic Transformations. *The Journal of Economic History*, 66 (4), 1072–1075.
<https://doi.org/10.1017/S0022050706000441>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/download/4128/2423>
- Stevanus, K. (2019). Pelestarian Alam sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis-Teologis. *Kurios*, 5(2), 94.
<https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.107>
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9 (1), 39–50.
<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>
- Walhi. (2020). *Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global*. WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
<https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>